

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecurangan, korupsi, penyalahgunaan asset, penggelapan dana masih menjadi momok bagi sebagian besar perusahaan terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Pasalnya, pengolahan kerja yang sudah terbagi atas tugas dan kewenangan serta meluasnya pengawasan terhadap elemen perusahaan menjadikan ruang lingkup dalam pengawasan menjadi lebih luas. Salah satu hal yang dapat dijadikan bukti atas berjalannya suatu kegiatan ekonomi didalam perusahaan adalah dengan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan proses penting dalam sebuah instansi, sebab hal tersebut merupakan proses sistematis dimana tercipta suatu laporan keuangan. Dalam penyusunan keuangan kehati-hatian dan ketelitian serta kecocokan pelaporan yang ditulis atau disajikan dengan keadaan sesungguhnya yang terjadi selama satu periode tertentu. Hasil dari penyusunan laporan keuangan adalah laporan keuangan yang berperan sebagai wakil yang ditunjukkan dari kinerja sebuah perusahaan dalam satu periode akuntansi. FASB menyatakan bahwa pelaporan keuangan tidak hanya mencakup laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu informasi

sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik, dan lain-lain dikutip dari (Ghozali & Chariri, Teori Akuntansi, 2007).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2012) menyatakan laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis bagi para penggunanya.

Pentingnya penyusunan laporan keuangan agar kualitas dan keandalannya dapat terjamin sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pengambilan keputusan untuk periode mendatang, serta sebagai alat untuk mengukur seberapa mampu sebuah entitas tersebut dapat menjangkau rencana-rencana pada periode mendatang. Perusahaan yang sehat bias dilihat dari kondisi keuangan yang baik.

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam *Statement of Financial Accounting Concept* No. 8, *Financial Accounting Standard Board* (FASB, 2000), menjelaskan mengenai kerangka kerja konseptual untuk laporan keuangan SFAC No. 8 ini mencakup tujuan dan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan, yang sebelumnya dinyatakan dalam SFAC No. 1 dan SFAC No. 2. Tujuan pelaporan keuangan tidak hanya terbatas pada isi laporan keuangan namun juga pada media pelaporannya. Cakupan pelaporan keuangan lebih luas dibandingkan dengan laporan keuangan. FASB menyatakan

bahwa pelaporan keuangan tidak hanya mencakup laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu informasi sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik, dan lain-lain (Ghozali & Chariri, Teori Akuntansi, 2007)

Sebelum manajemen siap untuk menyuguhkan laporan keuangan kepada pemilik, *stakeholders*, pemerintah, dan masyarakat tentunya sudah mempersiapkan diri dengan menyusun laporan keuangan sesuai dengan kriteria pelaporan keuangan sebagaimana dijelaskan oleh FASB, dengan antisipasi oleh Pengendalian Internal agar laporan keuangan yang disusun dan dihasilkan adalah pelaporan yang sesungguhnya dan dapat dibuktikan keandalannya, tidak hanya berguna bagi pemeriksaan lanjut oleh pihak audit eksternal tetapi juga sebagai pengawas dalam sistematika penyusunan laporan keuangan agar kualitas dan keandalannya dapat memuaskan bagi para stakeholders, manajemen, pemerintah, pemilik dan masyarakat luas. Untuk menyusun laporan keuangan dengan kualitas yang dapat diandalkan, tentunya memerlukan sistematika penugasan dalam pengawasan penyusunan laporan keuangan, hal tersebut dapat diwujudkan nyatakan dengan adanya Pengendalian Internal.

Pengendalian Internal adalah susunan terstruktur mengenai perencanaan dan pengawasan kegiatan dalam suatu entitas, untuk menyusun strategi serta mengontrol jalannya aktivitas perusahaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (Mulyadi, Sistem Akuntansi, 2013), pengendalian internal meliputi struktur

organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal harus mencakupi untuk memberikan kepastian yang keyakinan bahwa:

1) Setiap transaksi yang dicatat adalah benar-benar ada eksistensi.

Pengendalian intern tidak dapat memberikan transaksi fiktif dan yang sebenarnya tidak terjadi didalam catatan akuntansi.

2) Semua transaksi yang terjadi dicatat.

Setiap prosedur yang dimiliki perusahaan harus memberikan pengendalian untuk mencegah penghilangan untuk setiap transaksi dari catatan.

3) Semua transaksi yang dicatat disajikan dengan nilai yang benar.

Tujuan dilakukan hal ini adalah menyangkut keakuratan informasi untuk transaksi akuntansi.

4) Semua transaksi diklasifikasikan perkiraan yang tepat.

Klasifikasi perkiraan yang pantas sesuai dengan perkiraan sebagaimana dibuat oleh perusahaan didalam jurnal agar laporan keuangan dinyatakan dengan wajar.

5) Semua transaksi dicatat pada waktu yang tepat.

Transaksi dicatat sesuai pada tanggal terjadinya. Setiap catatan transaksi baik sebelum atau setelah waktu terjadinya memperbesar kemungkinan adanya mencatat atau dicatanya dalam jumlah yang tidak pantas, yang dapat mengakibatkan salah saji dalam laporan keuangan.

Menurut (Romney & Steinbart, 2009) pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk dapat berjalan dengan maksimal pengendalian internal harus mencakup lima komponen. Menurut (Widjaja, 2010), lima komponen pengendalian internal yaitu:

- 1) Pengendalian Internal yaitu Lingkungan pengendalian internal sebagai dasar atau pondasi pengendalian internal.
- 2) Penilaian Risiko sebagai identifikasi resiko dan analisis resiko. Identifikasi resiko seperti pengujian faktor eksternal (persaingan dan perubahan ekonomi) dan internal (karakteristik pengolahan sistem informasi, kompetensi karyawan, aktivitas perusahaan). Analisis resiko meliputi kemungkinan terjadinya resiko dan bagaimana penanggulangannya.
- 3) Aktivitas Pengendalian meliputi prosedur dan kebijakan yang menjamin bahwa karyawan menjalankan arahan manajemen atau peraturan yang sudah ditetapkan. Didalamnya meliputi respon terhadap system pengendalian, pemisahan tugas serta pengendalian terhadap system informasi.
- 4) Informasi dan Komunikasi sistem informasi yang relevan bertujuan untuk pelaporan keuangan yang mencakup informasi akuntansi. Kualitas

informasi sangat berdampak terhadap keputusan yang nantinya diambil pihak manajemen dan pemegang kepentingan.

- 5) Pemantauan sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun dan memelihara pengendalian internal. Pemantauan dilakukan sebagai bahan pertimbangan apakah pengendalian tersebut perlu diperbaiki, ditambah atau dikurangi sebagaimana mestinya apabila perubahan kondisi menghendakinya. Pemantauan adalah proses kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu.

Sebuah entitas yang sudah besar dimana tanggung jawab sudah terbagi-bagi namun tetap *dihandle* oleh pusat tentunya memerlukan pengawasan yang lebih *intens* termasuk dalam hal *controlling* aktivitas perusahaan. Pengendalian Internal sangat penting sebab berisi rencana prosedural, metode, serta ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk mengontrol, mengawasi, dan menjaga aset-aset perusahaan serta memantau apakah ketentuan-ketentuan dalam perusahaan telah dilaksanakan sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku. Hal tersebut tentu saja sangat berguna dan dapat membantu dalam informasi akuntansi yang dapat dibuktikan keandalannya. Sehingga dapat mencegah kejadian-kejadian yang bisa menjadi fatal lantaran tidak adanya wujud nyata pengawasan selama penyusunan laporan keuangan. Kejadian fatal dalam laporan keuangan dimana laporan keuangan tidak bisa dibuktikan keandalan dan integritasnya dan merugikan sebuah instansi terkait salah satunya adalah dimana terjadi (*fraud*) kecurangan. *Fraud* adalah kecurangan yang dilakukan

oleh individu atau sekelompok bisa dari orang dalam maupun orang luar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan *illegal*. Banyak yang beranggapan bahwa *fraud* adalah kecurangan yang berhubungan dengan penggelapan keuangan atau korupsi saja, namun *fraud* adalah segala kecurangan yang merugikan suatu entitas. Menurut ACFE dalam (Tuanakotta, 2010) mengelompokkan *fraud* (kecurangan) menjadi tiga jenis dikenal dengan istilah *fraud trhee*, yaitu penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*), pernyataan palsu (*fraudulent statement*), dan korupsi (*corruption*). Menurut (Tuanakotta, 2010) dalam melakukan tindakan *fraud*, seseorang tentunya memiliki dasar atau motivasi yang berbeda-beda. Tindakan *fraud* karena beberapa motivasi yang dikenal dengan istilah segitiga *fraud* (*fraud triangle*), yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*retionalization*).



Gambar.1.1 *Fraud Triangle*

Tekanan (*pressure*) bisa terjadi apabila disuatu masa terjadi hal mendesak yang dialami oleh pelaku *fraud* sehingga dia memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*, bila terdapat peluang (*opportunity*) atau kesempatan tentu

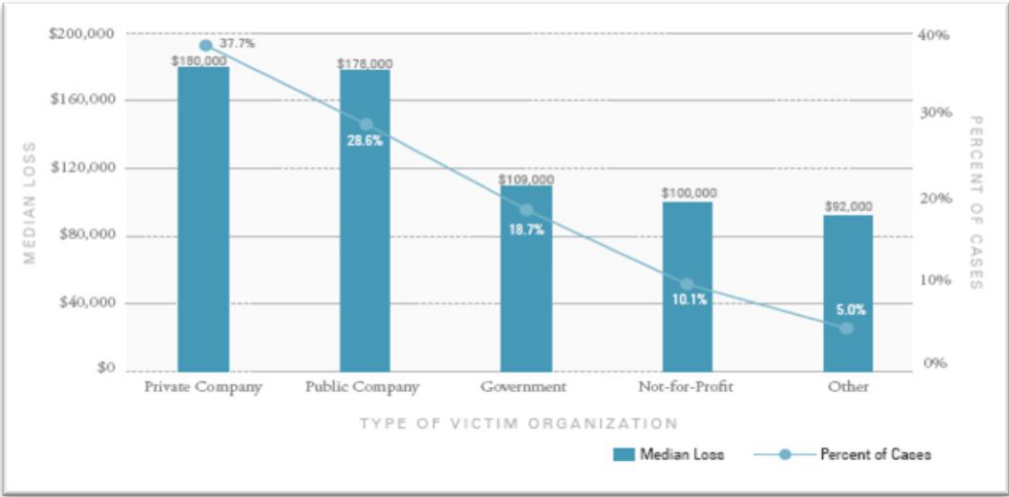
keadaan tersebut bisa memperlancar rencananya, serta pembenaran (*retionalization*) atas tindakan yang dilakukan seperti karyawan mengetahui laba perusahaan dan berfikir bahwa labanya sudah sangat banyak jadi tidak apa jika mengambil (menggelopkan) sedikit, atau pembenaran tindak kecurangan yang dilakukan sebab merasa apa yang dilakukan kepada perusahaan tidak sebanding dengan imbas balik yang diterima dari perusahaan. Pada Negara berkembang *fraud* sudah marak terjadi dan tidak pandang bulu dalam kejadiannya, hal inilah yang tidak membuat organisasi kebal terhadapnya. Sementara masih banyak entitas perusahaan yang memiliki pola pikir bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi disini (diperusahaannya) sebab merasa yakin, serta didukung oleh praktik *fraud* yang sangat rapi hingga sulit dideteksi secara kasatmata tanpa evaluasi mendalam, hal tersebut yang memicu dibutuhkanya Pengendalian Internal yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan *fraud*.

Dalam hal ini terutama *fraud* dalam hal kegiatan yang mengandung unsur ekonomis. Praktik *fraud* dapat terjadi pada perusahaan besar, kecil, swasta, negeri, maupun non-profit. *Fraud* sudah terjadi pada banyak level organisasi seperti perusahaan swasta, perusahaan publik, pemerintahan, non-for-profit, dan lainnya (ACFE, 2016). Kasus *fraud* pada lembaga keuangan pernah terjadi di BMT Fastabiq Kantor cabang Wedarijaksa. Pada tahun 2017 terjadi penggelapan uang dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 154.000.000 dari hasil penarikan uang nasabah yang tidak disetorkan dan pengambilan uang tabungan nasabah tanpa seizin oleh

nasabah. Kasus tersebut diungkap dari laporan nasabah kemudian ditelusuri dan dilaporkan ke Polsek Wedarijaksa dengan Surat Laporan Polisi No: LP/B/19/IV/2017/JTG/RES PT/SEK WDR, (KabarInvestigasi, 2017). Kasus *fraud* pada lembaga keuangan lain juga terjadi yaitu di Bank Syariah Mandiri (BSM) Jakarta pada tahun 2014, penggelapan yang dilakukan oleh dua orang pegawainya sendiri hingga merugikan pihak bank sebesar Rp.75 Milyar. Kasus tersebut berdasarkan temuan oleh audit internal kemudian kasus dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya hingga dimuat pada media online (Detiknews.com, 2015).

Tabel 1.1

Type of victim organization



Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016)*

Association of Certifies Fraud Examiners (2016) menunjukkan dalam

gambar.2 bahwa perusahaan swasta mempunyai signifikan kasus yang telah banyak diantara tipe organisasi lainnya pada tahun 2016 sebesar 37,7%. Sedangkan

dibawanya yaitu perusahaan publik sebesar 28,6%, pemerintah sebesar 18%, non-for-profit sebesar 10,1%, dan lainnya sebesar 5%. Kemudian untuk besar median loss, perusahaan swasta \$180.000, perusahaan public \$178.000, pemerintah \$109.000, non-for-profit \$100.000, dan lainnya \$92.000.

Penelitian (ACFE, 2016) menunjukkan bahwa persentase dan median loss perusahaan swasta berada pada posisi cukup tinggi. Lembaga keuangan simpan pinjam merupakan contoh perusahaan swasta. Kondisi pengelolaan seoptimal mungkin masih belum memaksimalkan performa dan menekan terjadinya praktik kecurangan.

Sebuah entitas pastinya memiliki peraturan dan kode etik yang harus dipatuhi oleh nasabah entitas tersebut. Namun berbicara soal entitas dimana didalamnya terdapat berbagai macam individu dengan berbagai macam karakter. Walau dalam prakteknya pada saat perekrutan karyawan tentunya sudah melalui proses pemilihan yang panjang dan seleksi yang matang, namun tindak kecurangan tidak hanya timbul dari sifat bawaan pelaku tapi bisa jadi sebab adanya kesempatan, seiring berjalannya waktu, dan dalam kehidupan seseorang tidak akan tahu kemungkinan apa yang akan terjadi dimasa depan. Dalam melakukan tindakan *fraud*, seseorang tentunya memiliki dasar atau motivasi yang berbeda-beda. Tindakan *fraud* karena beberapa motivasi yang dikenal dengan istilah segitiga fraud (*fraud triangle*), yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*retionalization*), (Tuanakotta, 2010). Bisa difikirkan apabila modus atau motivasi tersebut terbuka secara lebar tanpa adanya

control internal yang memantau peraturan dan menegaskan ketidakbenaran tindakan *fraud* tersebut, maka porak poranda aktivitas disebuah perusahaan. Antisipasi semacam inilah yang mendorong sebuah entitas untuk mencegah terjadinya *fraud* dengan membentuk Pengendalian Internal. Kesalahan dan kecurangan dapat lebih cepat terdeteksi apabila fungsi pengendalian internal berperan aktif dalam penyusunan laporan keuangan.

Pencegahan kecurangan menurut (Widjaja, 2010) merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, yaitu:

- 1) Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
- 2) Menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
- 3) Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan

Sedangkan tujuan pencegahan kecurangan menurut (Widjaja, 2010) yaitu:

- 1) Menciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu.
- 2) Proses rekrutmen yang jujur.
- 3) Pelatihan fraud awareness
- 4) Lingkup kerja yang positif
- 5) Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati
- 6) Program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan

- 7) Tanamkan kesan bahwa setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi setimpal.

Menurut (De Fond & Jiambalvo, 1991) terdapat tiga faktor untuk meminimalisir kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak dalam pelaporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, dapat diminimalisir oleh pengendalian yang memungkinkan deteksi.
- 2) Auditing adalah sebuah proses untuk mengendalikan tindakan manajemen terkait dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan.
- 3) Komite audit adalah elemen penting dari lingkungan pengendalian perusahaan yang dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan *overstatement*.

Kecurangan (*fraud*) juga bisa terjadi pada lapisan manapun di perusahaan, karena sifatnya yang tidak pandang bulu dan dapat terjadi kapan saja ditambah motivasi dan peluang jika ada kesempatan, menjadikan *fraud* rawan terjadi oleh siapa saja dan dimana saja. Pada perusahaan besar dimana pemilik menyerahkan wewenang menjalankan perusahaan kepada pihak manajemen, yang mana menyebabkan terjadinya ketimpangan informasi dimana manajemen memiliki pemahaman yang lebih baik dan mendalam mengenai kondisi internal perusahaan dan prospek kedepan

terhadap perusahaan. Padahal didalam perusahaan tidak hanya terdapat pemilik dan manajemen, namun juga karyawan dan nasabah perusahaan. Agar tidak terjadi ketimpangan informasi yang ada serta keberpihakan terhadap kepentingan manapun selain kepentingan bersama yaitu kepentingan yang menjadi tujuan perusahaan, maka perlu adanya *corporate governance*. Menurut (Sutedi, 2006), *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang memberikan nilai tambah sehingga tidak terjadi ketimpangan pada elemen-elemen diperusahaan.

Corporate governance sebagai pengatur guna menentukan dan mengarahkan strategi dan kinerja perusahaan. Agar tidak muncul adanya perspektif dimana siapa yang paling berhak dan hanya memiliki hak mengatur jalannya arah perusahaan. *Corporate governance* bisa menjadi sebagai pihak penengah tak berwujud ketika muncul keegoisan beberapa pihak yang merasa menjadi paling penting, sehingga muncul *fraud tree* yaitu kesempatan, motivasi, dan pembenaran. Agar setiap elemen dalam perusahaan dapat memahami posisinya dan sadar bagaimana kewajiban yang harus dijalankan dan hak yang nantinya diterima. *Good Corporate Governance* dalam penerapannya dibutuhkan prinsip-prinsip. Menurut (KNKG, 2012) (Zarkasyi, 2008), prinsip GCG yaitu:

- 1) **Transparansi.** Dalam menjalankan objektivitas dan sportivitas dalam berbisnis, perusahaan perlu menyediakan informasi yang relevan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengakses dan memahami. Perusahaan juga berinisiatif dalam mengungkapkan laporan tentang perusahaan tidak hanya laporan keuangan saja namun segala aspek yang perlu dilaporkan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan.
- 2) **Akuntabilitas.** Mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan transparan dan wajar. Akuntabilitas diperlukan untuk mencapai kesinambungan.
- 3) **Responsibilitas.** Perusahaan patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan melaksanakan tanggung jawab terhadap seluruh nasabah perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
- 4) **Independensi.** Pengelolaan perusahaan harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- 5) **Kewajaran dan Kesetaraan.** Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan semua orang yang terlibat didalam perusahaan.

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini mengambil judul: “PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah permasalahan diatas, dapat ditarik rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*?
- b. Bagaimana *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* ?
- c. Bagaimana Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* ?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*.
- b. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud*.
- c. Untuk menguji pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan seperti yang telah diuraikan diatas, sehingga penelitian ini dapat memberikan nilai kegunaan yang positif bagi pihak terkait dan masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

- a. Bagi penelitian untuk menambah wawasan dalam mengembangkan wawasan penelitian khususnya mengenai pengaruh Pengendalian Internal dan *Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud*.
- b. Bagi entitas dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan kebijakan internal perusahaan.
- c. Bagi pihak lain sebagai bahan referensi bagi calon peneliti berikutnya untuk yang berminat melakukan penelitian mengenai pengaruh Pengendalian Internal dan corporate governance terhadap pencegahan *fraud*.
- d. Bagi masyarakat diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan mengenai pengendalian internal dan *corporate governance* dalam pencegahan *fraud*.